

Pengaruh Pemanfaatan E-Procurement, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Dan Penerapan Sistem Pengendalian Internal (SPI) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empirik Pada Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang)

Aris Munaryadi ¹, Heru Sulistiyo ²

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharmaputra Semarang

Abstract. *The quality of financial reports is the most important factor in government organizations such as the Class 1 Agricultural Quarantine Office in Semarang. This study aims to analyze the effect of e-procurement, the application of government accounting standards, and the internal control system for the quality of financial reports. The population in this study were all employees of the Class 1 Semarang Agricultural Quarantine Center with 110 employees. The number of samples in this study was 110 employees with the sampling method using the census. The data analysis method used is the path analysis model.*

The results of the research are the simultaneous effect of the use of e-procurement, the application of government accounting standards, and the internal control system together have a significant (0,000) and effect (122,450) on the quality of financial reports. The effect of the use of e-procurement, implementation of government accounting standards, and internal control systems on the quality of financial reports is 77%.

The results of the partial hypothesis testing of the use of e-procurement have a positive (0,379) and significant (0,000) effect on the quality of financial reports. The application of government accounting standards has a positive (0,397) and significant (0,000) effect on the quality of financial statements. The internal control system has a positive (0,186) and significant (0,016) effect on the quality of financial statements.

Keywords: *Utilization of e-procurement, application of government accounting standards, internal control systems, quality financial reports.*

Abstrak. Kualitas laporan keuangan merupakan unsur terpenting dalam organisasi pemerintah seperti Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan e-procurement, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang yang berjumlah 110 pegawai. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 110 pegawai dengan metode pengambilan sampel menggunakan sensus. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis model regresi.

Hasil penelitian pengaruh simultan pemanfaatan e-procurement, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh (122,450) dan signifikan (0,000) terhadap kualitas laporan keuangan. Pengaruh pemanfaatan e-procurement, penerapan standar akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 77%.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial pemanfaatan e-procurement berpengaruh positif (0,379) dan signifikan (0,000) terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan standar

akuntansi pemerintah berpengaruh positif (0,397) dan signifikan (0,000) terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif (0,186) dan signifikan (0,016) terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: Pemanfaatan e-procurement, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, kualitas laporan keuangan.

LATAR BELAKANG

UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". APBN yang bersumber dari pajak maupun non pajak merupakan salah satu kekayaan negara menjadi wajib hukumnya untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sesuai ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan kondisi di atas, maka peran laporan keuangan yang baik menjadi salah satu bagian dari keberhasilan kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Gambaran ini mendorong pelaksana pengelola keuangan untuk dapat menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak tahun 2015. Secara sederhana, penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan untuk mengatasi ketidakcukupan basis kas memberikan data yang lebih akurat dan dapat digunakan oleh para pengguna informasi. Ini berarti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat telah memberikan informasi yang diperlukan untuk para stakeholders antara lain wakil rakyat, aparat penegak hukum, pihak-pihak yang memberi pinjaman/donasi/investasi, pemerintah serta rakyat sebagai stakeholders utama.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Setiap jenis Laporan Keuangan tersebut memiliki fungsinya masing-masing dalam memberikan informasi keuangan dari seluruh entitas pada pemerintah pusat. Dalam Laporan Realisasi Anggaran, masyarakat dapat melihat realisasi pendapatan dan belanja yang dilakukan pemerintah selama setahun.

LRA memuat informasi jenis dan jumlah pendapatan yang masuk ke kas negara serta jumlah belanja serta perutukan belanja pada APBN. Dengan membandingkan pendapatan dan belanja tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah pemerintah mengalami surplus atau defisit. Bila pemerintah mengalami surplus, masyarakat dapat mengetahui penggunaan surplus tersebut, apakah digunakan untuk pengeluaran pembiayaan ataukah menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA).

Kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh e-procurement (Rohmah, Askandar dan Sari, 2020). E-procurement diartikan oleh Davila, Gupta, Pilmer (2003) sebagai teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet, manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik serta aspek-aspek fungsi yang didukung oleh bermacam-macam bentuk komunikasi secara elektronik. Semakin efektif e-procurement maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. E-procurement yang baik maka kualitas Laporan Keuangan akan semakin baik pula sesuai dengan hasil penelitian Mildamayanti, Abdullah dan Akib (2018), Achmad (2018), Rohmah, Askandar dan Sari (2020), Kathryn dan Rohendi (2020) yang menemukan bahwa pengadaan barang berbasis elektronik berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas Laporan Keuangan yang dikemukakan oleh Agatha, Diana dan Mawardi (2020) adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah yang semakin baik maka akan meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang dibuat. Dimana beberapa penelitian yang mendukung tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Holle, Salle dan Sanggenafa (2019), Ikyarti dan Aprila (2019), Rohmah, Askandar dan Sari (2020), Agatha, Diana, Mawardi (2020), Hendri dan Erinos (2020) yang menemukan bahwa standar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan.

Selain itu Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal/SPI (Firmansyah dan Sinambela, 2020). Menurut PP 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI terdiri atas beberapa unsur, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Sistem pengendalian internal yang semakin baik maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan, hal ini dikemukakan oleh Holle, Salle dan Sanggenafa (2019), Ikyarti dan Aprilia (2019), Riyanita dan Widiastuti (2020), Rohmah, Askanandar dan Sari (2020), Firmansyah dan Sinambela (2020) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan.

KAJIAN TEORITIS

Teori Stewardship.

Teori yang relevan yang digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan (hipotesis) dan penyusunan instrumen penelitian. Grand teori dalam penelitian ini adalah Stewardship Theory karena pemerintah dalam hal ini diharapkan mampu bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan principal yaitu masyarakat dan instansi diharapkan nantinya dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan kegiatan yang diamanahkan kepadanya.

Teori stewardship dikemukakan oleh Davis, Scoorman dan Donaldson (1997) menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi. Teori stewardship dapat diterapkan pada penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan (Morgan, 1996).

E-Procurement

Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 37 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan tentang e-procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Sedangkan menurut Davila, Gupta, Pilmer (2003) menyebutkan bahwa e-procurement adalah teknologi yang dirancang untuk memfasilitasi pengadaan barang melalui internet, manajemen seluruh aktivitas pengadaan secara elektronik serta aspek-aspek fungsi yang didukung oleh bermacam- macam bentuk komunikasi secara elektornik.

Penerapan e-procurement diperoleh manfaat seperti yang dijelaskan oleh Widjaya (2009) yaitu bahwa manfaat e-procurement dibagi menjadi dua kategori yaitu efisien dan efektif. Efisiensi mencakup biaya yang rendah, mempercepat waktu dalam proses e-procurement, mengontrol proses pembelian dengan lebih baik, menyajikan laporan informasi, dan pengintegrasian fungsi-fungsi e-procurement sebagai kunci pada sistem back-office. Sedangkan efektifitas yaitu meningkatkan kontrol rantai nilai, pengelolaan data penting yang baik, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam proses pembelian pada organisasi. Beberapa model untuk mengukur tingkat kesuksesan sistem informasi telah dikembangkan oleh banyak peneliti. Yang paling mendapat perhatian lebih dari para peneliti yaitu model Delone dan Mclean.

Model tersebut dirasa cocok karena banyak peneliti di Indonesia telah menggunakan model Delone & Mclean untuk mengukur kesuksesan sistem. Penelitian tentang keberhasilan e-procurement pernah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan model Delone and Mclean di Kota Surabaya oleh Mujahidin dan Pramadani (2013) dan dilakukan oleh Taufik, Daewanis, Fahlei (2016) untuk penelitian di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh. Penelitian tersebut menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dari variabel yang diteliti dengan menggunakan Model Delone and Mclean mampu untuk menganalisa kesuksesan implementasi e-procurement.

Standar Akuntansi Pemerintah

Permadi (2013) menyatakan bahwa SAP adalah suatu standar penyusunan laporan keuangan untuk lingkup pemerintahan yang di susun sesuai dengan prinsip- prinsip Akuntansi sebagai pedoman dalam hal penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan salah satu syarat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010).

Dalam PP 71 tahun 2010, disebutkan bahwa pemerintah harus menerapkan SAP berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) membuat suatu perubahan terhadap pola pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia (Bahri, 2019). SAP menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik sekaligus bersih. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP).

Penyusunan SAP yang dijelaskan oleh Bahri (2019) berbasis akrual dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) melalui proses baku penyusunan (due process). Proses baku penyusunan SAP merupakan pertanggung jawaban profesional KSAP. Penyusunan PSAP dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP) serta kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDP-PLK). Keduanya merupakan konsep dasar penyusunan, pengembangan SAP, serta merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. KKAP merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

SAP dikukuhkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual (untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana). Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 telah diganti dengan Peraturan Pemerintahan No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju basis akrual (cash toward accrual).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) telah ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang diterapkan sebagai entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Akuntansi Pemerintah menurut PP No. 71 Tahun (2010) pasal 1 ayat 2 adalah : Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Sedangkan menurut penelitian sebelumnya oleh Sudarsono dan Darsono (2016) indikator penerapan sistem akuntansi keuangan diukur dengan :

1. Kesesuaian sistem dengan SAP

Dalam pembuatan akuntansi laporan harus disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2. Pengidentifikasian transaksi

Peristiwa atau kejadian dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua), yaitu : pertama peristiwa ekonomi (transaksi) dan kedua peristiwa non- ekonomi (non-transaksi). Peristiwa diklasifikasi sebagai transaksi jika memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut : satu menyebabkan perubahan dana dan dua dapat diukur menggunakan satuan dana Akuntansi hanya memproses transaksi. Oleh karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi peristiwa bisnis yang terjadi, apakah memenuhi kriteria sebagai transaksi atau sebagai non-transaksi.

3. Pencatatan transaksi

Dasar pencatatan yang dapat dipergunakan dalam akuntansi yaitu: pertama Cash Basis Pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat transaksi keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai. Kedua Accrual Basis Pencatatan

transaksi keuangan dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum.

4. Bukti disetiap transaksi

Bukti transaksi adalah berbagai formulir yang menjadi bukti terjadinya transaksi tertentu, berbagai formulir yang biasanya menjadi bukti transaksi antara lain faktur, kwitansi, nota penjualan dan lain –lain (Rudianto, 2012).

5. Pencatatan kronologis

Pencatatan kronologis dari histori transaksi yang ada.

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud (Afriyanti, 2011). Menurut PP 60 tahun 2008 Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI terdiri atas beberapa unsur, yaitu: Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan Pemantauan pengendalian intern. Menurut Arens et al., (2008), pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memiliki peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (fraud) serta melindungi sumber daya organisasi. Salah satu tujuan umum manajemen dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif adalah agar informasi pelaporan keuangan reliabel.

Sukmaningrum (2012) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan bagian dari manajemen resiko yang harus dilaksanakan oleh setiap lembaga atau organisasi untuk mencapai tujuan lembaga atau organisasi. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan stakeholders. Sukmaningrum (2012) juga menyatakan

bahwa sistem pengendalian intern meliputi berbagai alat manajemen yang bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan yang luas. Tujuan tersebut yaitu menjamin kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, menjamin keandalan laporan keuangan dan data keuangan, memfasilitasi efisiensi dan efektivitas operasi pemerintah. Dengan demikian, pengendalian intern merupakan fondasi good governance dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakabsahan data dan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu kriteria pemberian opini laporan keuangan adalah evaluasi atas efektivitas SPI. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Sistem Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan suatu pemerintah daerah yang tercermin dari keteladanan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan (Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006). Pengawasan internal di Kabupaten/Kota dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang disebut Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang didanai dengan APBD Kabupaten atau Kota. Menurut Committee of Sponsoring organizations of the Treadway Commission (COSO) (2013), dimensi untuk mengukur sistem pengendalian internal, meliputi (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian internal.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 14/PMK.09/2017, tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian, dan Review Pengendalian Intern, atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, bab II, Pasal 2 bahwa indikator Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat:

1. Mendukung pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan organisasi secara khusus adalah terlaksanakannya tugas pokok dan fungsi organisasi tingkat Kuasa Pengguna Anggaran dan terlaksanakannya visi misi organisasi tingkat Kuasa Pengguna Anggaran. Tujuan organisasi secara umum adalah

sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

2. Berguna untuk pengambilan keputusan khususnya dalam perencanaan strategis.

Perencanaan anggaran kegiatan bermanfaat dalam pengambilan keputusan strategis sesuai dengan tujuan utama yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (BAPPENAS).

3. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu.

Waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan besaran realisasi anggaran kegiatan telah sesuai dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Anggaran Kegiatan (ROPAK) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).

4. Mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat.

Keseimbangan antara aspek biaya dan manfaat diukur dengan penilaian Analisa resiko apabila kegiatan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan Sebagian.

5. Menjaga kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan diukur dari dua aspek, yang pertama adalah dari aspek kesesuaian dengan turunan peraturan perundang-undangan pelaksanaan kegiatan yang berupa petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari pihak berwenang dan aspek pelaksanaan anggaran kegiatan berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah tipe deskriptif kuantitatif. Ghozali (2013) menyatakan penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa yang dirumuskan. Penelitian ini berfungsi menjelaskan, meramalkan, dan juga mengontrol suatu gejala dengan pendekatan kuantitatif.

Jenis data penelitian ini menggunakan data interval yaitu data yang dinyatakan dalam operasi aritmatika pada data yang dikumpulkan dari responden (Ghozali, 2013). Untuk mendapat data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan 2 jenis data (Ghozali, 2013)

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dengan survey lapangan yang menggunakan metode pengumpulan data original. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah jawaban responden yang merupakan persepsi responden terhadap variabel-*procurement*, standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh E-Procurement terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian e-*procurement* terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan sehingga dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik e-*procurement* maka semakin baik kualitas laporan keuangan.. E-*procurement* melalui peralatan teknologi informasi, kapasitas bandwidth, alat pengganti tanda tangan dan materai, perlindungan terhadap gangguan sistem aplikasi dan ketersediaan petunjuk atau pedoman pelaksanaan yang baik maka akan mampu meningkatkan Kualitas laporan yang dibuat. E-*procurement*/E- purchasing adalah tata cara pengadaan/pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (Peraturan Presiden, Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).

Hasil penelitian ini didukung oleh Pilander, Saerang dan Gamaliel (2018), Mildamayanti, Abdullah dan Akib (2018), Achmad (2018), Rohmah, Askan dan Sari (2020), Kathryn, Rohendi (2020) yang menemukan bahwa pengadaan barang berbasis elektronik berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan..

Implementasi dari hasil penelitian ini adalah peningkatan kualitas laporan keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang dapat dicapai melalui e- *procurement*. peralatan teknologi informasi, kapasitas bandwidth, alat pengganti tanda tangan dan materai, perlindungan terhadap gangguan sistem aplikasi dan ketersediaan petunjuk atau pedoman pelaksanaan yang baik maka akan mampu meningkatkan Kualitas laporan yang dibuat.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap Kualitas laporan keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan sehingga dapat diintepetasikan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka semakin baik Kualitas laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang mampu memiliki kesesuaian dengan sisten SAP, mampu mengidentifikasi transaksi, terdapat pencatatan transaksi, dilengkapi bukti disetiap transaksidan terdapat pencatatan kronologis mampu meningkatkan Kualitas laporan keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang. Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3)).

Semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka akan meningkatkan Kualitas laporan keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang. Hasil penelitian ini sesuai dengan Salle dan Sanggenafa (2019), Ikyarti dan Aprila (2019), Rohmah, Askandar dan Sari (2020), Agatha, Diana, Mawardi (2020), Hendri dan Erinos (2020) yang menemukan bahwa satandar akuntansi pemerintah (SAP) berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas laporan keuangan.

Implementasi dari hasil penelitian ini adalah peningkatan Kualitas laporan keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang dapat dicapai melalui penerapan standar akuntansi pemerintah. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang mampu memiliki kesesuaian dengan sisten SAP, mampu mengidentifikasi transaksi, terdapat pencatatan transaksi, dilengkapi bukti disetiap transaksidan terdapat pencatatan kronologis mampu menngkatkan Kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan pengujian sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan mempunyai pengaruh positif dan signifikan sehingga dapat diintepetasikan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, pengambilan dan perencanaan strategis, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat serta menjaga kepatuhan terhadap hukum mampu meningkatkan Kualitas laporan keuangan.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan atau fraud (Afriyanti, 2011).

Semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Penelitian ini didukung oleh Salle dan Sanggenafa (2019), Ikyarti dan Aprilia (2019), Riyanita dan Widiastuti (2020), Rohmah, Askanandar dan Sari (2020), Firmansyah dan Sinambela (2020) yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Implementasi dari hasil penelitian ini adalah peningkatan kualitas laporan keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang dapat dicapai melalui sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal ditujukan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, pengambilan dan perencanaan strategis, sistematis, terstruktur, dan tepat waktu, mempertimbangkan keseimbangan aspek biaya dan manfaat serta menjaga kepatuhan terhadap hukum mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa e-procurement berpengaruh positif (0,379) dan signifikan (0,000) terhadap Kualitas laporan keuangan, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik e-procurement maka semakin baik kualitas laporan keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang.
2. Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif (0,397) dan signifikan (0,000) terhadap Kualitas laporan keuangan, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah maka semakin baik kualitas laporan keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang.
3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif (0,186) dan signifikan (0,016) terhadap Kualitas laporan keuangan, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal maka semakin baik kualitas laporan keuangan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Semarang.

Saran

Saran atau rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Menambah entitas Pemerintah lainnya untuk menambah anggota populasi dalam penelitian berikutnya, misalnya semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi bahkan Negara Republik Indonesia, sehingga dapat disimpulkan secara umum.
2. Bagi Balai Karantina Pertanian Kelas I Semarang, agar dapat meningkatkan indikator variabel yang masih bernilai sedang untuk menjadi tinggi, seperti: perlindungan terhadap gangguan keamanan system aplikasi, penerapan standar akuntansi pemerintah, penerapan SPI, kelengkapan dan keandalan laporan keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, N. R. 2018. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Agatha, K. V., Diana, N., & Mawardi, M. C. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(07).
- Aren, Alvin A, Randal J, Beasley, dan Mark S. (2008). *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi kedua belas. Jakarta: PT Indeks IKPI
- Arfianti, D. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Bahri, S. 2019. *Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS*. ANDI: Yogyakarta
- Davis, J.H, Schoorman, D.F & Donaldson, L. 1997. Toward a Stewardship Theory of Management. *The Academy of Management Review*. 22(1), 20-47
- Davila, Gupta & Palmer. 2003. Moving Procurement Systems to the Internet: The Adoption and Use Of E-Procurement Technology Models. *European Management Journal*
- Firmansyah, I., & Sinambela, R. T. 2020. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Barat. *Land Journal*, 1(1), 1-15.

- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (8th ed.)*. Semarang: Badan Penerbit - UNDIP.
- Hendri, M., & Erinosa, N. R. 2020. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479-2493.
- Holle, V. A., Salle, A., & Sanggenafa, M. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 16-35.
- Ikyarti, T., & Aprilia, N. 2019. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9(2)
- Kathryn, B., & Rohendi, H. 2019. Pengaruh Penerapan E-Procurement Terhadap Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dan Implik.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana menulis Tesis?* Jakarta: Erlangga.
- Mildamayanti, M., Abdullah, M., & Akib, M. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, 3(2).
- Morgan, D. L. 1996. Focus Group. *Annual Review of Sociology*. 22, 129-152
- Mudjahidin and Pramadani. 2013. Analisis Keberhasilan E-Procurement Pemerintah Kota Surabaya Menggunakan Information System Success Model, *Jurnal Teknik Pomits*, 1(1), 1-11
- Permadi, A. D. (2013). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat).
- Pilander, S. M., Saerang, D. P., & Gamaliel, H. 2018. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(2).
- Riyanita, A. G., & Widiastuti, H. 2020. Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pelatihan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(1), 115-128.
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. 2020. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(05).

- Rudianto. 2012. Pengantar Akuntansi. Konsep dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan. Erlangga: Jakarta
- Soetanto, L. A., Setiobudi, K. J., & Nugraha, P. (2015). Analisa Kendala Pelaksanaan E-procurement Di Kota Surabaya. *Jurnal Dimensi Pratama Teknik Sipil*, 4(2).
- Sudarsono, G., & Darsono, D. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Grobogan) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Sugiyono (2014). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmaningrum. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang, Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
- Taufik, Darwanis and H. Fahlevi. 2016. Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen Terhadap Pelaksanaan.
- Warren, Carl.S. Reeve, James M. Duchac, Jonathan E. Triwahyuni, Ersa. Jusuf, Amir Abadi (2017) *Pengantar Akuntansi 1*, Salemba Empat.
- Widjaja, H. A. E. 2009. Implementasi e-Procurement pada Rumah Sakit. *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi*,
-Internal Control-Integrated Framework, COSO 2013
-Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
-Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual.
-Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Pengendalian intern pada Pemerintah Daerah
-Peraturan Pemerintahan No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
-Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
-PMK No. 14/PMK.09/2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat [JDIH BPK RI] BN.2017/NO.277
-Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945